

Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Dena Haryani¹, Aldri Frinaldi²

^{1,2}Universitas Negeri Padang

Email: denaharyani63@gmail.com, alfrinaldi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan, kendala, serta upaya dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 variabel yaitu implementasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan dan tertib administrasi pertanahan. Data yang penulis dapatkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pendataan dalam pemilihan informan antara lain kepada masyarakat, pegawai fungsional, serta kepala bidang infrastruktur Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa beberapa kendala yang menyebabkan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan belum terimplementasi dengan baik. kendala yang penulis temui dalam penerapan sistem aplikasi geospasial komputerisasi (GeoKKP) dalam upaya tertib administrasi pertanahan di badan pertanahan nasional kota padang antara lain: komunikasi yang kurang baik, sumber daya manusia (SDM), sistem jaringan kurang stabil, dan kurangnya komitmen antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan tersebut.

Kata kunci: *Implementasi Geokkp, kendala, Tertib administrasi pertanahan.*

Abstract

This study aims to determine how the application of a computerized geospatial application system (GeoKKP) in an effort to order land administration in the National Land Agency of Padang City. This type of research is qualitative research using descriptive methods. In this study the authors used 2 variables, namely the implementation of a computerized geospatial system for the land office and an orderly land administration. The data that the writer got through observation, interview, and documentation. With data analysis techniques, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Based on the results of research in the field, it can be seen that several problems have caused the geospatial application system for computerized land offices to be not implemented properly. The obstacles that the authors encounter in the application of a computerized geospatial application system (GeoKKP) in an orderly effort of land administration in the Padang City National Land Agency include: poor communication, human resources (HR), unstable network systems, and lack of commitment between policy makers. and implementers of the policy.

Keywords: *Geokkp implementation, constraints, Orderly land administration.*

Pendahuluan

Dewasa ini penggunaan sistem informasi manajemen sangat mudah untuk kita jumpai. Umumnya semua instansi baik swasta maupun pemerintah sudah menerapkan hal tersebut dalam berbagai kegiatannya. Ada banyak bidang yang menggunakan sistem informasi manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan kantor seperti dalam pengelolaan surat menyurat, manajemen pegawai bahkan hingga pengurusan hal-hal yang lebih khusus. Kantor Pertanahan ialah lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas dan kewajiban pemerintah dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu fungsi kantor Pertanahan Nasional ialah memberikan pelayanan administrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Padang untuk meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat. Namun seiring perkembangan teknologi dan tuntutan pembaharuan maka lahirlah berbagai bentuk inovasi dari instansi tersebut yang dinamakan sistem aplikasi Geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) yang hanya bisa diakses oleh pejabat fungsional bidang infrastruktur. Sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) diharapkan dapat meminalisir permasalahan pertanahan serta menciptakan sistem informasi tata administrasi kantor pertanahan yang baik dan teratur berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 mengenai: “informasi geospasial dapat bermanfaat untuk sistem *Support* dalam pengambilan keputusan di organisasi dapat memaksimalkan pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan data pertanahan”.

Aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) adalah sistem aplikasi yang diambil dari sistem informasi geografis (SIG) dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan data tekstual dan data spasial kedalam suatu sistem website melalui jaringan internet. Diantara data spasial juga digunakan *updating* peta pendaftaran ialah peta analog dapat dimasukkan berdasarkan namadaerah dan tahun setelah itu lakukan proses penginputan peta dan pendigitalisian serta dijadikan peta tunggal. Selain itu pada data tekstual juga dapat digunakan ialah surat ukur dan buku tanah. Sistem operasi Geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) ialah satu sistem dapat dibuat dan dihubungkan data spasial serta data tekstual kedalam server. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu para pegawai dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Aplikasi ini dinilai efektif dan efisien karena keakuratan data. Ada dua jenis data pertanahan yang dapat digitalisasi yaitu data tekstual dan data spasial.

Data tekstual adalah data yang berbentuk teks yang menjelaskan kondisi fisik tanah, seperti letak, lokasi, keadaan tanah, dan luas tanah. Sedangkan data spasial merupakan data vektor yang berupa garis yang memiliki arah dan panjang. Aplikasi ini hanya digunakan oleh pegawai fungsional bidang infrastruktur Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dengan masuknya menggunakan ID dan Password. Sistem geospasial merupakan sistem informasi dari turunan sistem informasi geografis (SIG). SIG juga merupakan sistem dari sistem informasi manajemen. Menurut Hamdi (Agustin, 2018) sistem informasi manajemen merupakan proses dalam pengolahan data menjadi sebuah informasi dan bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Aplikasi tersebut bisa dijadikan sebagai informasi dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pengambilan keputusan dalam organisasi. SIM ialah implementasi perkembangan SIM dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik. Ini terlihat dari Pengembangan TIK telah memberikan pilihan dalam tercapainya pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. (Aldri, 2014)

Selain itu, aplikasi ini juga berkaitan dengan penerapan elektronik government. E-government ialah pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen untuk dapat meningkatkan kerja sama organisasi dan pihak lainnya. Penggunaan SIM ini juga bisa mendapatkan interaksi dalam wujud baru antara lain: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). Kegunaan e-government kepada pemerintah diharapkan bisa memberikan pilihan kepada reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Indrajit mengemukakan (2006:4) Electronic Government adalah mekanisme interaksi yang baru digunakan antara pemerintah dan masyarakat, dimana pelaksanaannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Model pemerintahan elektronik ini menggabungkan kepuasan yang diperoleh melalui tata kelola elektronik dan kepuasan yang diperoleh pegawai pemerintah yang umumnya merupakan kontributor kepercayaan masyarakat yang dipegang terhadap pemerintah (Welch, Hinnant, & Moon, 2005). Selain itu, pemerintahan elektronik juga berpotensi mengubah administrasi publik menjadi lebih berorientasi pada pelanggan. Agar lebih berorientasi pada pelanggan, pemerintah harus memahami kebutuhan pelanggan (Schedler & Summermatter, 2007). (Aldri Frinaldi, Muhammad Ali Embi dkk, 2020)

Jadi, dengan adanya aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Tertib administrasi pertanahan dapat terwujud dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, pembuatan sertifikat hak atas tanah serta pelayanan lainnya. Sehingga berbagai bidang tanah sudah disediakan rangkuman berkaitan dengan aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak, dan kepastian hukumnya juga dikelola dalam sistem informasi pertanahan lengkap. Tertib administrasi pertanahan merupakan salah satu sasaran dari catur tertib pertanahan yang ditentukan dalam Tap MPR Nomor IV/MPR/1978 sebagai dijadikan landasan dan sekaligus sasaran untuk mengadakan penataan kembali penggunaan dan pemilikan tanah serta program-program dibidang pertanahan dalam rangka terwujudnya tanah kesejahteraan dan keadilan rakyat indonesia. tertib administrasi pertanahan dapat terwujud dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah, sehingga setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap. (Mira novanna ardani 2019)

Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP), bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan, meningkatkan dan mempercepat pelayanan dibidang pertanahan, meningkatkan kualitas informasi pertanahan, mempermudah pemeliharaan data pertanahan, menghemat *space/storage* untuk penyimpanan data-data pertanahan dalam bentuk digital (*paperless*), meningkatkan kemampuan SDM pegawai, melakukan standarisasi data dan sistem informasi dalam rangka mempermudah pertukaran informasi pertanahan serta menciptakan suatu sistem informasi pertanahan yang handal dalam. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem aplikasi Geo KKP ini adalah jembatan menuju tertib administrasi pertanahan yang lebih baik.

Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa permasalahan yang terlihat antara lain: pelayanan administrasi yang kurang baik, kurangnya transparansi pegawai kepada masyarakat terkait pelayanan berbasis online ini, kurangnya pemahaman pegawai dalam mengoperasikan sistem GeoKKP, dan jaringan internet yang kurang stabil.

Berdasarkan permasalahan penulis paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bagaimanakah implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tercapainya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?
- 2) Apa saja kendala yang ditemui dalam implementasi sistem aplikasi geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?
- 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan melalui sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang?

Metode Penelitian

Metode dalam pengkajian ini ialah jenis pengkajian kualitatif serta memakai teknik menggambarkan. Pengkajian kualitatif ialah suatu proses pengkajiandimana data dihasilkan berupa tulisan maupun secara langsung serta perlakuan orang dapat dilihat pada saat melakukan observasi. sedangkan metode deskriptif merupakan suatu metode yang memberikan gejala-gejala terhadap suatu peristiwa yang faktanya benar-benar ada yang datanya akan dikaji secara sistematis sesuai dengan prosedur penelitian. Dengan demikian penelitian yang dilakukan ini menggambarkan seluruh gejala atau keadaan yang ada dilapangan berdasarkan data yang benar-benar adanya sesuai dengan fakta terkait dengan Implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib tata usaha pertanahan di kantor agraria Kota Padang. Dalam penghimpunan data penulis menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang penulis gunakan dalam menguji keabsahan data yaitu triangulasi data sumber, dengan membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara. Sementara itu, teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2014)

Terkait pengkajian ini, maka informan harus didasarkan pada relevansi pengetahuan dan pengguna aplikasi *GeoKKP* mengenai Implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Informan yang kemungkinan berhubungan langsung dengan penelitian penulis yaitu:

Daftar 1. Nara Sumber

No	Nama	Kedudukan
1.	Y	Kepala seksi infrastruktur pertanahan
2.	MES	Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan dan kadastral
3.	GW	Kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik
4.	RAR	Operator aplikasi <i>Geokkp</i> dan pegawai fungsional
5.	A	Masyarakat
6.	Y	Masyarakat

Sumber: *Data diolah peneliti, 2020*

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi (GeoKKP) Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Penerapan kebijakan ialah tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Dalam artian bahwa implementasi kebijakan menentukan keberhasilan dari suatu proses kebijakan apakah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter & Van Horn penerapan kebijakan merupakan suatu kegiatan dari badan publik dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Winarno, 2012). Dalam penggunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (GeoKKP) diharapkan bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam tertib administrasi pertanahan. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertanahan, antara lain: (1) transparansi, satu kondisi di mana semua individu memiliki hak memahami masing-masing proses pembentukan serta pengambilan keputusan didalam pemerintah. (2) kejelasan, suatu sikap keterbukaan individu kepada orang untuk mendapatkan informasi yang tidak salah, dapat dipercaya, serta tidak diskriminasi. Tertib tata usaha pertanahan ialah satu kegiatan digunakan untuk meringankan serta memudahkan orang dalam semua kegiatan jasa dibidang pertanahan mempunyai manfaat sehingga supaya tidak ada kesenjangan sosial orang agar formalitas layanan teratur, lancar, ekonomis, tangkas, serta tidak susah.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Dalam artian bahwa implementasi kebijakan menentukan keberhasilan dari suatu proses kebijakan apakah sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat dimaknai sebagai pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sebelumnya sehingga program yang dilaksanakan tersebut dapat memberikan dampak bagi masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam menanggulangi masalah yang menjadi sasaran program tersebut.

Sistem aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (GeoKKP) merupakan suatu aplikasi yang diambil dari Sistem Informasi Geografis (SIG), yang digunakan untuk menghubungkan data spasial dan data tekstual ke dalam suatu sistem lalu disimpan ke dalam server Kantor Pertanahan. Aplikasi ini hanya digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional seluruh Indonesia. Salah satu data spasial yang digunakan dalam updating peta pendaftaran yaitu peta analog yang kemudian diinventerisasi berdasarkan nama desa dan tahun, setelah itu lakukan scanning peta dan pendigitasian kemudian diimport dan dijadikan peta tunggal yang telah terstandarisasi BPN. Sedangkan pada data tekstual yang digunakan adalah Surat Ukur (SU) dan Buku Tanah (BT). Dengan adanya sistem aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan (*GeoKKP*) yang bertujuan untuk membantu mengurangi masalah pertanahan dan menciptakan Sistem Informasi dan Manajemen Kantor Pertanahan yang baik sesuai dengan Undang-undang

Implementasi sistem GeoKKP pada penelitian ini peneliti ukur dengan menggunakan teori George C. Edwards III (Subarsono,2005:90). Yang terdiri dari 4 aspek yang dianggap berpengaruh terhadap implementasi serta kinerja dari suatu kebijakan, antara lain:

Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, proses komunikasi antara pihak pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di badan pertanahan nasional kota padang dalam kondisi kurang baik. dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian dilapangan bahwa dari

pegawai kurang mendapatkan sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan, dan pegawai hanya belajar secara otodidak. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang kurang menjalin sosialisasi dengan pemerintah yang terkait dengan pelayanan berbasis online. Seperti yang dijelaskan oleh ibuk Resti Amelia Rusma, selaku operator aplikasi GeoKKP, yang menyebutkan bahwa:

“...kami yang pegawai baru hanya bisa belajar secara otodidak mengenai aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan, ini dikarenakan kurangnya pengetahuan pegawai dalam penggunaan aplikasi ini. Sehingga sering kali kami salah memasukkan data yang dibutuhkan dan membuat pelayanan menjadi lama...” (Wawancara tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dilihat bahwa, pemerintah kurang menjalin komunikasi dengan baik. baik itu komunikasi dengan sesama pegawai, masyarakat, ataupun OPD yang terkait. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam suatu penerapan kebijakan. Penerapan akan efektif terjadi apabila aktor pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Hal tersebut dapat berjalan jika komunikasi nya juga berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif dapat dilihat pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasil dari kegiatan tersebut semakin mendekati target maka akan lebih efektif dan sebaliknya. Pengukuran efektifitas komunikasi meliputi 1) Pemahaman, yaitu penerimaan yang cermat terhadap isi rangsangan sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan dikatakan bermanfaat jika penerima memperoleh pemahaman yang tepat tentang pesan yang disampaikan oleh pengirim kata. 2) Mempengaruhi sikap, komunikasi dikatakan bermanfaat jika dapat mempengaruhi pandangan penerima pesan sesuai dengan keinginan pengirim. 3) Tindakan, komunikasi dikatakan bermanfaat jika dapat mendorong penerima pesan untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diinginkan oleh pengirim pesan. (Gusfi & Frinaldi, 2018)

Sumber daya

Selain komunikasi, sumber daya juga merupakan hal terpenting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya yang andal dan berkualitas akan membuat implementasi dapat berjalan dengan baik. Sumber daya adalah faktor yang sangat penting dan mendukung imlementasi kebijakan. Kekuatan suatu organisasi berantung pada kemampuannya menggunakan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa dalam implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di badan pertanahan nasional kota padang dilihat dari sumber daya manusia masih belum mencukupi baik dari kualitas ataupun kuantitas. Seperti yang dijelaskan oleh ibuk Galuh Wardina selaku kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik yang mengatakan bahwa:

“...kami mengerahkan seluruh sumber daya manusia dikantor ini untuk berusaha secara maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pengelolaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan, apalagi kami memang bekerja dibidang pertanahan tentunya kami berusaha maksimal, namun dari segi kuantitas belum memadai dan tak seimbang dengan banyaknya masyarakat yang melakukan pendaftaran tanah, pembuatan sertifikat hak atas tanah, penyelesaian sengketa tanah. Karena yang melakukan pekerjaan

menggunakan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan hanya bidang infrastruktur saja...” (Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibuk Resti amelia rusman, S.AP., selaku operator aplikasi GeoKKP, beliau mengatakan bahwa:

“...saya sebagai petugas operator sering kali kesulitan dalam melayani masyarakat menggunakan aplikasi Geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Hal ini disebabkan kami bidang infrastruktur masih kekurangan pegawai yang berlatar belakang IT. Dengan sumber daya manusia yang secukupnya kami terpaksa melayani masyarakat dengan jangka waktu yang lama...” (Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa, jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan masih kurang untuk melaksanakan kebijakan karena jumlah sumber manusianya tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan yang akan dilakukan. Sumber daya adalah faktor penting untuk implemementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif, tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja. Sumber daya meliputi empat komponen, yaitu: Staf yang cukup (jumlah dan mutu), Informasi yang dibutuhkan, *Authority*, yaitu kewenangan yang cukup untuk melaksanakan tugas, dan tanggung jawab, Sarana yang dibutuhkan dalam pelaksana. Hal ini terkait dengan dengan sumber daya yang tersedia untuk mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan.(dalam Subarsono, 2005:90). Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan teori yang digunakan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dilihat dari segi kuantitas da kualitas belum memadai dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga pelayanan dalam bidang pertanahan misalnya pengurusan sertifikat hak atas tanah, pendaftaran tanah menjadi terkendala karena kurangnya pemahaman pegawai dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*).

Disposisi (Sikap pelaksana)

Implementor Badan Pertanahan Nasional Kota Padang bersikap menerima dan menjalankan kebijakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Yuhendri selaku Kepala seksi Infrastruktur Pertanahan tanggal 08 September 2020 mengatakan bahwa:

“...sebagai pelaksana, tentu kami memiliki sikap menerima kebijakan dari Kementerian Pertanahan Republik Indonesia dan menjalankannya, sesuai peraturan yang berlaku. Kebijakan ini juga bisa kami jadikan acuan dalam melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas dalam memberikan pelayanan dengan menggunakan sistem aplikasi Geospasial Komputerisasi Kantor Pertanahan...” (Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Senada dengan hal itu, menurut bapak Mario Eka Saputra selaku kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan yang menyebutkan bahwa:

“...sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas dalam penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan , kami bidang infrastruktur berupaya keras untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya

kepada masyarakat sebagaimana mestinya, berbagai upaya telah kami untuk memaksimalkan kinerja pegawai...”(Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaksana kebijakan dapat menerima dan melaksanakan kebijakan tentang penggunaan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Badan pertanahan nasional kota padang bersikap menerima dan menjalankan kebijakan. Tetapi, dalam praktiknya tidak sesuai dengan seharusnya, ini disebabkan pelaksana hanya berfokus pada kinerja pegawai dalam penggunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan, sedangkan untuk kualitas pelayanan masyarakat kurang diperhatikan.

Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplemetasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standart operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap impelementor dalam bertindak. Struktur birokrasi adalac karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. (dalam Subarsono, 2005:90) seperti yang diejelaskan oleh bapak Yuhendri, S.SIT., M.H selaku Kepala seksi Infrastruktur Pertanahan mengatakan bahwa:

“...untuk kebijakan pengunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan beracuan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Namun belum ada SOP khusus dari pemerintah dalam menjalankan pelayanan menggunakan aplikasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Dan Untuk Standar Operating Procedures (SOP) menggunakan SOP umum BPN. Dimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pegawai...” (Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Selain itu ibuk Galuh Wardina., S.T., M.P.W.K, selaku kepala sub seksi pengukuran dan pemetaan dasar dan tematik juga mengatakan bahwa:

“...Kami di Badan Pertanahan Nasional menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang paling atas Kepala Kantor, kepala seksi, kepala sub seksi, dan paling bawah pegawai kantor yang menjalankan tugas sesuai dengan peran dan kewajiban masing-masing...” (Wawancara pada tanggal 08 September 2020)

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan, struktur birokrasi badan pertanahan nasional kota padang dalam implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi telah sesuai dengan peran dan tugas masing-masing pegawai, namun SOP khusus dalam penggunaan aplikasi *Geokp* belum disediakan oleh pemerintah.

Kendala Dalam Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksana/ penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, serta memberikan hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi (Kamila dan Syamsir,2019:276). Pada dasarnya, implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang Sudah berjalan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada dalam proses pelaksanaan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang ada beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang tersebut, yaitu:

Pertama, Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kurang baik. ini terlihat dari pegawai kurang mendapatkan sosialisasi dari aktor pembuat kebijakan mengenai aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan sehingga pegawai kebanyakan belajar secara otodidak dan belajar dari pegawai yang lebih mengerti tentang penggunaan aplikasi ini. Selain itu, tidak adanya konsistensi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Ini terjadi karena kurangnya komunikasi pegawai kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lama dan berbelit-belit.

Kedua, Sumber daya manusia yang kurang memadai. Terutama dalam hal pengoperasian sistem aplikasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Jumlah staf dibidang infrastruktur di Badan Pertanahan Nasional Kota berjumlah +- 10 orang, sedangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan tersebut harus orang yang memiliki keahlian dibidang komputer. Sehingga proses pengelolaan dan penginputan data-data harus bertahap dan memakan waktu yang cukup lama.

Ketiga, Sistem jaringan yang tidak stabil. Hal ini tentu menjadi permasalahan dalam menginput data baik itu data spasial maupun data tekstual. Karena sistem ini harus selalu terhubung dengan jaringan yang stabil serta harus selalu online.

Keempat, Kurangnya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan penggunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Hal ini juga dipicu karena kurangnya pemahaman para implementor dan pelaksana kebijakan tentang tujuan dari kebijakan tersebut. Sehingga pegawai dalam menjalankan kebijakan belum konsisten dan menyebabkan permasalahan pelayanan kepada masyarakat menjadi rumit.

Kelima, Dana anggaran tidak mencukupi dalam melakukan pelatihan ataupun sosialisasi implementasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional kota padang.

Keenam, kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan hal lainnya secara online. Masyarakat sudah terbiasa mengurus surat menyurat secara manual. Hal ini disebabkan tidak adanya fasilitas seperti android atau komputer dalam menggunakan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*Geokkp*) tersebut.

Upaya Dalam Mengatasi Kendala Implementasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan (Geokkp) dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Nasional Kota Padang tidak biarkan begitu saja. Setiap kendala yang dihadapi dicarikan solusi oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Upaya yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang adalah sebagai berikut:

Pertama, BPN lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Dari segi kuantitas, BPN memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada pegawai mengenai sistem GeoKKP sehingga permasalahan yang terjadi dalam aplikasi tersebut dapat diatasi. Dari segi kualitas, BPN membuat sanksi bagi pegawai yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, dan menimbulkan efek jera sehingga pegawai lebih giat dan disiplin dalam menjalankan tugasnya.

Kedua, Sosialisasi dan koordinasi antara kementerian agraria/tata ruang tanah RI dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang harus sering dilakukan supaya tidak terjadi *miss communication* antar pegawai. Dengan sering dilakukan sosialisasi maka permasalahan sistem akan segera teratasi dengan baik.

Ketiga, Meningkatkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan penggunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Membentuk kelompok kerja untuk mengatasi masalah yang terjadi didalam sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*). Melalui hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Kota Padang dapat meningkatkan konsistensi dalam melakukan upaya pencegahan dan peningkatan kualitas sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Keempat, Untuk mengatasi permasalahan jaringan yang tidak stabil, sebaiknya Badan Pertanahan Nasional Kota Padang memasang jaringan *wifi* disetiap bidang yang ada dikantor, sehingga dengan lancarnya koneksi internet maka penginputan data-data secara online bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

Kelima, Pengusulan tambahan anggaran untuk tahun selanjutnya dalam kegiatan sosialisasi. Dengan adanya anggaran tambahan dari pemerintah maka pegawai akan banyak melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan yang dapat membantu pegawai menggunakan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. Sehingga, pegawai bisa terlatih dalam penggunaan sistem aplikasi tersebut.

Keenam, memberikan fasilitas seperti komputer khusus bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan sertifikat tanah, mendaftarkan tanah, dan pengurusan lainnya yang menggunakan aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan (*GeoKKP*) di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang telah dilakukan penulis tentang Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang, Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang belum

berjalan secara maksimal. Penulis menyimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Nasional Kota Padang: (a) dari segi komunikasi masih kurang baik. ini terlihat dari pegawai kurang mendapatkan sosialisasi dari aktor pembuat kebijakan mengenai aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan sehingga pegawai kebanyakan belajar secara otodidak dan belajar dari pegawai yang lebih mengerti tentang penggunaan aplikasi ini. Selain itu, tidak adanya konsistensi pegawai dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Ini terjadi karena kurangnya komunikasi pegawai kepada masyarakat sehingga pelayanan menjadi lama dan berbelit-belit. (b) dari segi sumber daya dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang digunakan dalam implementasi dari segi kuantitas dan kualitas belum memadai. Pegawai bidang infrastruktur yang ditunjuk sebagai pengelola aplikasi sistem geospasial komputerisasi kantor pertanahan belum memiliki pengetahuan dalam pengelolaan aplikasi berbasis online ini. (c) dari segi disposisi, Badan Pertanahan Nasional Kota Padang bersikap menerima dan menjalankan kebijakan. Namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal karena pelaksana hanya berfokus pada kinerja pegawai dalam penggunaan sistem aplikasi Geospasial komputerisasi kantor pertanahan. Sedangkan untuk kualitas pelayanan masyarakat kurang diperhatikan. (d) dari segi struktur birokrasi, telah sesuai dengan peran dan tugas masing-masing pegawai, namun untuk SOP khususnya belum disediakan oleh pemerintah.

Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Sistem Geospasial Komputerisasi Dalam Upaya Tertib Administrasi Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang adalah: (a) Komunikasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan kurang baik. (b) Sumber daya manusia yang kurang memadai. (c) Sistem jaringan yang tidak stabil, dan (d) Kurangnya komitmen dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. (e) kurangnya anggaran dana, dan (f) masih kurangnya fasilitas untuk masyarakat dalam melakukan pengurusan pendaftaran tanah.

Upaya yang dilakukan mengatasi kendala yang dihadapi adalah: (a) BPN lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam implementasi sistem geospasial komputerisasi dalam upaya tertib administrasi pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Padang. (b) Meningkatkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan penggunaan sistem aplikasi geospasial komputerisasi kantor pertanahan. (c) memasang jaringan *wifi* disetiap bidang di Badan Pertanahan Nasional, (d) Sosialisasi dan koordinasi antara kementerian agraria/tata ruang tanah Republik Indonesia dengan Badan Pertanahan Nasional Kota Padang harus sering dilakukan. (e) pengusulan tambahan anggaran untuk sosialisasi, (f) memberikan fasilitas untuk masyarakat seperti komputer khusus untuk melakukan pendaftaran tanah ataupun pembuatan sertifikat hak atas tanah.

Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2018). Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 13-18.
- Ardani, M.N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas, dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law & Governance*, 2(1), 1-10
- Arisaputra, M. I., Ashri, M., Abdullah, K., & Bakar, D. U. M. (2017). Akuntabilitas Administrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertifikat. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 276-291.

- Frinaldi, A., & Embi, M.A. (2020). E-Government as Intervening of Work Culture to Increase Internal Customer Satisfaction. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(6), 24-35
- Frinaldi, A. (2014). *Sistem Informasi Manajemen*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
- Gusfi, P. S., & Frinaldi, A. (2018). The effectiveness of external organization communication on regional disaster management agency at Padang City in implementing the tsunami early warning system. *Matec Web of Conferences*.
<https://doi.org/10.1051/matecconf/201822902010>
- Indrajit, I. (2006). *E-Government In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Subarsono, S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sugiyono, S. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: Alfabeta.